

BAB IV

DAMPAK MODERNISASI DALAM PERSOALAN LINGKUNGAN

DI INDONESIA PERIODE 2000-2009

Modernisasi telah mempengaruhi proses pembangunan di Indonesia sejak awal masa orde baru. Hal itu ditandai dengan digunakannya istilah “pembangunan” dalam kabinet Soeharto serta semakin kentara lagi ketika Soeharto mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA I-VI). Selanjutnya, modernisasi menemukan momentumnya ketika pada tahun 1989 rezim komunis di Eropa Timur runtuh, dan modernisasi menjadi satu-satunya ‘resep’ pembangunan yang tertinggal. Ide awal modernisasi bisa jadi sederhana, tetapi implikasi praktisnya tidak dapat disederhanakan; karena realitas kehidupan sangat beragam dan kompleks. Modernisasi, merupakan resep bagi negara berkembang untuk bermetamorfosa menjadi negara maju. Namun pada perjalanannya, modernisasi juga menyeret berbagai tragedi; kesejahteraan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Berbagai hasil konvensi lingkungan yang diikuti masih kalah pamor dengan gagasan pembangunan yang ditawarkan oleh teori modernisasi. Hal itu ditandai dengan krisis lingkungan hidup yang hingga kini masih terjadi di Indonesia. Sebabnya adalah, model pembangunan berkelanjutan yang memiliki landasan bagi kelestarian lingkungan belum menjadi pilihan utama bagi

... dan Indonesia. Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal seperti

kehebatan pasar dalam mengendalikan proses pembangunan, serta industrialisasi yang menawarkan 'kemajuan' juga menjadi sebab dari gagalnya penerapan pembangunan berkelanjutan. Pasar, industrialisasi, serta didukung investasi adalah merupakan inti dari gagasan modernisasi yang implementasinya justru membawa berbagai kerusakan lingkungan.

A. Krisis Lingkungan Hidup Di Indonesia

Menurut Otto Soemarwoto dalam bukunya "Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan", manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Selain makhluk hidup, dalam ruang tersebut juga terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri dalam bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk tersebut. Dalam hal ini, makhluk hidup tersebut adalah manusia. Maka untuk selanjutnya, yang disebut sebagai lingkungan hidup dalam pembahasan ini adalah lingkungan hidup manusia.

Krisis lingkungan hidup di Indonesia, sejatinya telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Namun ironisnya, hingga saat ini krisis itu masih saja berlangsung. Kaitannya dengan pembangunan, krisis lingkungan hidup yang terjadi pada akhirnya tidak hanya berdampak pada masalah lingkungan saja,

Bentuk dari krisis lingkungan tersebut adalah terjadinya akumulasi fakta-fakta kerusakan lingkungan hidup pada beberapa daerah di Indonesia. Akumulasi fakta ini kemudian mempengaruhi kondisi lingkungan hidup di Indonesia secara keseluruhan. Beberapa contoh kasus kerusakan lingkungan hidup yang sangat menentukan tingkat kualitas lingkungan hidup Indonesia dimata dunia, atau setidaknya kasus kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang juga menjadi perhatian dunia, diantaranya adalah:

A.1 Kasus-Kasus Kerusakan Lingkungan¹

Sepanjang tahun 1999-2009, tercatat beberapa kasus kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang memiliki dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial yang amat luas. Beberapa kasus ini dapat dijadikan sebagai indikasi awal bahwa telah terjadi krisis lingkungan hidup di Indonesia yang sekaligus merupakan bentuk dari gagalnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Variasi sumber masalah lingkungan di Indonesia seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, dikelompokkan pada dua hal besar. Pertama, bersumber dari aktivitas industri dan konsumsi produk teknologi seperti pabrik-pabrik, barang-barang teknologi, transportasi yang menimbulkan

¹ Data di olah dari Laporan Walhi dalam "Environmental Outlook 2008: Hak Atas Lingkungan Hidup Masih Di Langit" 23 Desember 2008.
(http://www.walhi.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=154&Itemid=

pencemaran dan kerusakan ekosistem. Sementara sumber lainnya, adalah sebagai akibat usaha ekstraktif seperti eksploitasi hutan, pertambangan, perikanan, dan perluasan lahan-lahan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, pemukiman dan lainnya.²

A.1.1 Kasus Lumpur Lapindo

Tim pengawas penanganan lumpur lapindo yang dibentuk DPR RI, menyimpulkan bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo merupakan fenomena alam dalam rapat Paripurna DPR pada 19 Februari 2008. Kesimpulan tersebut hanya berbekal keterangan para ahli yang sependapat tentang hal tersebut, mengabaikan keterangan ahli lainnya yang memiliki pendapat berbeda dan tak menggali lebih dalam dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan tahun lalu yang menemukan bahwa PT Medici Citra Nusantara, kontraktor pengeboran yang ditunjuk oleh Lapindo yang juga merupakan milik group Bakrie, merupakan perusahaan yang tidak berkualitas di bidang pengeboran karena baru satu kali melakukan pengeboran pada tahun 2001. Pengeboran yang dilakukanpun tak menggunakan *casing* (selubung pengaman) pada kedalaman 8.500 kaki. Sehingga kuat dugaan semburan tersebut bukanlah karena dipicu oleh gempa bumi di Yogyakarta, sebab getaran gempa yang sampai ke lokasi semburan memiliki skala yang kecil

sekali yaitu hanya sebesar 1-2 skala MMI (*Modified Mercalli Intensity*) dan untuk dapat mengguncang atau merubah struktur lapisan tanah diperlukan kekuatan diatas 10 MMI. Mustahil jika tim DPR tersebut tidak melihat kesalahan fatal Lapindo lainnya dalam beroperasi, dimana lokasi pengeboran hanya berjarak 5 meter dari pemukiman warga dan 37 meter dari jalan tol Surabaya-Gempol. Hal ini jelas melanggar ketentuan Badan Standarisasi Nasional Indonesia yang mengatur tentang jarak minimum pengeboran di wilayah pemukiman dan fasilitas umum seperti rel kereta api dan jalan.

Menjelang akhir tahun 2008, fakta lain pun muncul dari dunia internasional terhadap kasus lumpur lapindo ini. Dimana dari 90 orang ahli geologi dunia yang berkumpul pada acara *International Confrence and Exhibiton* yang diselenggarakan oleh *American Association of Petroleum Geologist* (AAPG) pada tanggal 28 Oktober 2008 di Cape Town, Afrika Selatan, 42 diantaranya menyatakan pemboran adalah penyebab menyemburnya lumpur di Porong Sidoarjo, 13 ahli menyatakan penyebabnya adalah kombinasi gempa dan pemboran dan hanya 3 ahli yang mendukung gempa sebagai penyebab semburan.

A.1.2 Kasus PT. Freeport

Perjalanan PT Freport dalam kancah eksploitasi sumber alam Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1967. Kontrak Karya I diperbaharui pada 1991

dan kemudian dilanjutkan dengan Kontrak Karya II baru berakhir pada

2041. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan asing yang paling sering mendapat kritik karena *track record*-nya yang buruk. Sebuah badan pemerintahan Amerika Serikat yang mengikuti berbagai penyelewengan korporasi Amerika di luar negeri (*Over-seas Private Investement Corporation*) mencabut asuransi Freeport pada Oktober 1995. Asuransi itu tidak dapat diperpanjang karena kejahatan lingkungan yang dilakukan Freeport. Beberapa tahun lalu sebuah Yayasan Pensiunan di Norwegia juga menarik sahamnya dari Freeport, karena tidak tega melihat kematian ekosistem di zona pertambangan Freeport.³

Selain itu, Amein Rais juga menyebutkan bahwa Freeport McMoran telah melakukan banyak kejahatan, mulai dari kejahatan lingkungan, kejahatan pajak, kejahatan etika dan moral, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan administrasi.

Sebenarnya, selain Lapindo dan Freeport, ada banyak lagi contoh perusahaan yang menyebabkan krisis lingkungan terjadi di Indonesia. Namun Lapindo serta Freeport sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dikejar lewat industrialisasi yang didukung dengan investasi asing telah menyebabkan krisis lingkungan yang pada perjalanannya kemudian berdampak pula pada kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa.

A.1.3 Kerusakan Hutan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kondisi hutan Indonesia dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sepanjang tahun 2004-2009. Antara lain, lebih dari 11,23 juta hektare hutan telah dilepaskan untuk hutan tanaman industri, 20,29 juta hektare izin perkebunan besar kelapa sawit, hanya 6,7 juta hektar yang ditanami, sisanya ditinggalkan setelah diambil kayunya.

Hal mengejutkan lainnya muncul dari data tokoh reformasi, Prof. Dr. Amien Rais dalam bukunya yang berjudul “Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia”. Amien mengemukakan data bahwa, menurut kantor berita Reuters 72% hutan Indonesia telah musnah, sementara setengah dari sisanya terancam musnah. Guinness Book of Records (2008), diterbitkan September 2007, menyebutkan: *“Indonesia is the world champion in deforestation”*. Sedangkan menurut Greenpeace, selama tahun 2000-2005 Indonesia merupakan negara paling cepat dalam menggunduli hutan-hutannya. Setiap jam, hutan seluas tiga ratus kali lapangan sepak bola hilang untuk selama-lamanya.

Pemerintah sempat menyangkal data-data yang digunakan oleh beberapa lembaga diatas adalah data lama dan mengklaim angka kerusakan hutan di

Endang, dkk. (2010). *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Amien Rais mengatakan bahwa

hal itu wajar terjadi karena hutan yang tersisa tinggal sedikit, maka tidak dimungkinkan lagi terjadi kerusakan yang luas.

A.1.4 Kondisi Lingkungan Kawasan Pesisir Dan Kelautan

Hampir 90% produksi udang nasional diperuntukkan bagi ekspor. Setiap tahunnya 2-4 juta ton ikan raib akibat tindak penangkapan illegal dan 1 juta ton diekspor untuk memenuhi konsumsi negara maju melalui kesepakatan perdagangan bebas dengan Jepang, Cina, dan AS. Sementara produksi nasional yakni 4,86 juta ton (2008) telah mendekati ambang batas penangkapan 5,2 juta ton per tahun. Konsumsi ikan nasional 30 kg per kapita masih kalah jauh dengan Jepang yang luas lautnya seperlima laut Indonesia yakni 125 kg per kapita.

Akhir 2009, Walhi mengeluarkan data tentang berbagai tragedi yang terjadi di sekitar pesisir laut Indonesia. Data laju kenaikan permukaan air laut di Indonesia mencapai 5-10 mm per tahun; pencurian ikan oleh 10 negara; pembuangan limbah tailing dari perusahaan pertambangan skala besar masih terus terjadi di perairan Indonesia; perusakan ekosistem pesisir oleh reklamasi, tambak intensif, penambangan, alih fungsi hutan mangrove; sepanjang tahun 2009, sudah terjadi 3 kali pencemaran minyak di perairan Kepulauan Seribu; pencemaran minyak di Laut Timor akibat meledaknya sumur minyak Montara di Perairan Australia.

Kawasan pesisir selatan tak luput dari eksploitasi, Pemda Kabupaten

Perairan selatan ini merupakan kawasan yang sangat penting sebagai Perairan selatan

Rp 100 milyar tidak akan batal. Hak pengelolaan lahan (HPL) pada tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan megaproyek tersebut, dan sudah di kantong investor PT Awani Modern Indonesia (PT AMI). Investor akan memanfaatkan hak guna bangunan (HGB) pada lahan itu selama 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Ini akan berdampak terhadap hilangnya ekosistem sejumlah 190 bentukan gumpuk pasir di Parangtritis.

A.1.5 Kasus-Kasus Lingkungan Lainnya

Selain beberapa kasus lingkungan diatas, terdapat pula beberapa kasus yang tidak masuk dalam kategori tersebut, tapi tetap penting untuk di kaji. **Pertama**, persoalan pembuangan limbah beracun. Laporan WALHI 2008 mengatakan bahwa masih banyak perusahaan yang seenaknya saja membuang limbah beracun ke sungai, laut dan lahan-lahan kosong. Salah satu yang sempat terangkat ke media massa adalah kasus PT. Dongwoo Environmental Indonesia yang memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengolah limbah cair, malah membuang begitu saja limbah B3 di Kampung Sempu, Desa Pasir Gembong Bekasi.⁴ Akibatnya banyak penduduk yang dilarikan ke Rumah Sakit Cikarang. Sumber yang sama menyebutkan bahwa limbah dari industri pertambangan, energi dan Migas hanya 5% dari 64,4 juta ton yang dikelola dengan baik. Sementara di sektor industri manufaktur

⁴ Majalah Tempo edisi 23-29 Juni 2008, hal. 48

berskala besar dan sedang hanya sekitar 800 dari 20 ribu-an industri yang mengolah limbah dengan benar.

Kedua, bencana banjir. Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungai induk dan 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup sungai-sungai induk ini mencapai 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal: curah hujan yang tinggi; buruknya tata ruang; serta akibat adanya degradasi lingkungan. Menurut data dari Depkominfo, pada tahun 2007-2008 banjir telah terjadi di 13 propinsi, sedangkan banjir terluas di daerah sentra produksi terjadi di 7 propinsi. Banjir terluas di tujuh propinsi tersebut yaitu, Jawa Tengah mencapai 52.410 ha, Jawa Timur 44.342 ha, Jawa Barat 16.882 ha, Aceh 12.306 ha, Kalimantan Barat 11.871 ha, Banten 7.011 ha, Sumatera Utara 5.950 ha dan propinsi lainnya seluas 6.879 hektare.⁵ Walhi juga melaporkan pada akhir tahun 2008, kembali banjir melanda sebagian besar wilayah di Indonesia, diantaranya Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.

Ketiga, krisis energi, terutama listrik. Krisis energi di bidang kelistrikan ini pernah terjadi menjelang akhir abad ke-20. Hal ini mengisyaratkan bahwa suplai energi listrik tidak dapat mengimbangi tingginya laju permintaan. Ditengah kebutuhan Indonesia atas energi yang cukup besar, pemerintah

⁵ Depkominfo (<http://www.depkominfo.go.id/berita/berita-utama-berita/157651-ha-tanaman-padi-terendam-banjir/>, diakses 12 Januari 2010)

malah mengobral murah sumber-sumber energi Indonesia. Batu bara, dari sekitar 206 juta ton total produksi tahun lalu, 156 juta ton dijual ke pasar internasional. Beberapa alasan yang muncul kepermukaan adalah karena pembeli manca negara berani membeli dengan harga mahal, mau membayar lebih awal bahkan sampai menyimpan deposit jutaan dollar. Tapi bukankah pemerintah Indonesia (rakyat) pemilik sah dari bahan tambang tersebut, yang dapat mengatur quota ekspor, guna memenuhi kebutuhan domestik. Tetapi kenapa hal tersebut tidak dilakukan? Alhasil Indonesia mengalami masa kegelapan, hampir disemua wilayah mengalami pemadam listrik bergilir sepanjang tahun 2008 berlanjut hingga 2009.

Sepertinya tak ada yang bisa membantah bahwa Indonesia terus mengalami krisis ekologi yang semakin parah. Bencana ekologi semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2007 telah terjadi 205 kali bencana dan pada tahun 2008 intensitasnya meningkat sampai dengan 359 kali.

A.2 Dampaknya Terhadap Perekonomian Dan Kesejahteraan

Kasus Lumpur Lapindo berdampak pada rusaknya lahan subur, tercemarnya air tanah oleh unsur garam yang tinggi, serta kemungkinan munculnya danau karena terciptanya rongga dibawah tanah akibat lumpur yang menyembur.

Dampak ekonomi dan kemanusiaan juga lingkungan yang diakibatkan dari **Kasus Freeport** sebagian besar berdampak langsung pada masyarakat Papua. Setiap harinya Freeport membuang limbah perusahaannya sebanyak 300.000 ton. Akibatnya adalah rusaknya sistem sungai Aghawagon, Otomona dan Ajkwa. Selain itu, ratusan KM persegi hutan sekitar perusahaan tersebut telah berubah menjadi padang tandus tanpa kehidupan. Setengah abad berdiri di tanah Papua, belum terlihat perbaikan kualitas hidup masyarakat sekitar. Sebagian besar masyarakat Papua yang berada diwilayah Freeport masih menjadi buruh-buruh rendah yang jauh dari kesejahteraan.

Selanjutnya, dibidang **kerusakan hutan**, menurut WALHI, nilai uang yang hilang akibat kerusakan hutan adalah sekitar Rp 27 triliun setiap tahun. Sedangkan menurut Dephut, sampai pada tahun 2004, negara telah kehilangan Rp 83 milyar rupiah per hari.⁶ Memang ada perbedaan antara data dari WALHI dan Dephut, namun yang pasti, kerugian ekonomi akibat krisis lingkungan di bidang hutan tidaklah sedikit dan sangat mengganggu proses pembangunan di Indonesia.

Kondisi **masyarakat sekitar pesisir** dari negeri inipun tidak kalah menyakitkan. Kasus tambang pasir besi di Kulonprogo akan berimplikasi terhadap 123.601 jiwa yang menaruh harapan pada 4.434 ha lahan pertanian produktif di 4 kecamatan. Implikasi juga akan terjadi di sepanjang area

rencana eksploitasi pasir besi dengan luas bentang alam dan alih fungsi lahan sekitar 22km x 1,8km (6,8%) dari total luas Kabupaten Kulonprogo 586.27 km.⁷ selain itu, akibat pencurian ikan oleh 10 negara, Indonesia rugi 30 trilyun setiap tahun.

Akibat umum dari adanya **pencemaran limbah beracun** adalah berubahnya keadaan fisik maupun fungsi suatu lingkungan. Air sungai atau air sumur yang tercemar, yang semula berwarna jernih, berubah menjadi keruh berbuih dan terbau busuk, sehingga tidak layak dipergunakan lagi oleh warga masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci, apalagi untuk bahan baku air minum. Kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan pun terancam dengan timbulnya penyakit dari yang ringan seperti gatal-gatal pada kulit sampai yang berat berupa cacat genetik pada anak cucu dan generasi berikut. Parahnya lagi, penyakit akibat pencemaran ada yang baru muncul sekian tahun kemudian setelah cukup lama bahan pencemar terkontaminasi dalam bahan makanan menurut daur ulang ekologis, seperti yang terjadi pada kasus penyakit “Minamata” sekitar 1956 di Jepang. Terdapat lebih dari 100 orang meninggal atau cacat karena mengkonsumsi ikan yang berasal dari Teluk Minamata. Teluk ini tercemar merkuri yang berasal dari sebuah pabrik plastik.

Bencana banjir tidak hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluh lantakkan perumahan dan permukiman,

⁷ Penyelamatan Kawasan Pesisir dan Laut dari Intervensi Asing
(http://www.walhi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=166%3Apenyelamatan-

tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian semakin besar karena akibat banjir kegiatan ekonomi dan pemerintahan dapat terganggu bahkan terhenti. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata, terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan terganggunya proses pembangunan karena tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi parasana publik yang rusak. Data Deptan menyampaikan dampak banjir terhadap produksi padi nasional pada musim hujan 2007-2008 mengakibatkan gagal panen sekitar 60.000 hektar, setara dengan 0,3 persen dari luas tanaman yang ada, kerugian mencapai Rp 705 miliar.⁸ Krisis energi yang terjadi mengakibatkan Indonesia mengalami masa kegelapan, hampir disemua wilayah mengalami pemadam listrik bergilir sepanjang tahun 2008.

B. Faktor Internal

Indonesia sebagai negara berkembang yang secara realitas melihat pembangunan sebagai instrumen penolong bangsa, tetapi pada satu sisi juga melihat dan merasakan langsung akibat dahsyat yang ditimbulkan, menyambut konsep pembangunan berkelanjutan dengan sangat positif yang diterjemahkan lewat berbagai produk undang-undang dan program-program pembangunan.

⁸ Depkominfo (<http://www.depkominfo.go.id/berita/berita-utama-berita/157651-ha-tanaman-padi-terendam-banjir/>, diakses 12 Januari 2010)

Namun kemudian, apa yang menjadi harapan dalam undang-undang serta program-program pembangunan tersebut, hanyalah tinggal harapan saja. Permasalahan muncul dalam tataran implementasi. Minimnya implementasi menjadi faktor internal yang mengganjal Indonesia dalam mencapai keberhasilan pembangunan berkelanjutannya. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak 'harmonis' dengan alam pun menjadi sebab internal lain yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, sebagai bentuk gagalnya pembangunan yang berkelanjutan.

B.1 Minimnya Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan saat ini telah menjadi agenda internasional. Dapat dikatakan bahwa hampir semua negara di dunia, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang telah menyadari betapa pentingnya melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang. Pada kenyataannya, pembangunan yang dijalankan di Indonesia selama ini dirasakan kurang atau bahkan dapat dikatakan, tidak memperhatikan kaidah-kaidah konsep pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, ekologi, maupun sosial.

Apa yang diterima Indonesia dari berbagai pertemuan internasional yang

implementasi politik, ekonomi, dan sosialnya masing-masing belum menjadi aksi nyata, karena dominannya pemikiran ekonomi, profit atau pertumbuhan.⁹

Bukti nyata dari minimnya implementasi nilai-nilai kelestarian lingkungan yang terdapat dalam konsep pembangunan berkelanjutan adalah masih terjadinya krisis lingkungan hidup di Indonesia. Berbagai segi lingkungan hidup di Indonesia masih dibelit oleh persoalan-persoalan akibat tidak di implementasikannya konsep pembangunan berkelanjutan yang telah ada secara menyeluruh. Agenda 21, walaupun sudah dijadikan sebagai pedoman hingga ke tahap pembangunan tingkat kabupaten/kota, namun masih saja pemerintah tingkat kabupaten/kota seringkali menjatuhkan pembangunannya pada sektor pertumbuhan ekonomi dengan sumber daya lingkungan sebagai penopangnya.

Sonny Keraf berpendapat bahwa dalam pembangunannya, Indonesia perlu menggeser paradigma pembangunannya ke arah yang lebih bersifat keberlanjutan. Yakni berupa kebijakan nasional yang memberi prioritas pada kelestarian bentuk-bentuk kehidupan di bumi ini demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tolak ukur keberhasilan di dalam paradigma berkelanjutan adalah kualitas kehidupan yang dicapai dengan

⁹ Sonny Keraf, "Kebijakan Nasional dan Ekonomi Sektor Transisional dan

tidak lagi berdasarkan materil (pertumbuhan ekonomi) semata-mata seperti selama ini.¹⁰

Melihat berbagai fakta empirik dalam krisis lingkungan hidup di Indonesia, jelas bahwa pembangunan dengan paradigma berkelanjutan belum menjadi pilihan utama pemerintah Indonesia. Beberapa hasil konvensi internasional, walaupun sudah di ratifikasi, dan sudah diwujudkan dalam bentuk undang-undang, namun pada pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Beberapa hal yang menyebabkan minimnya implementasi tersebut adalah:¹¹

Pertama, sebagaimana dinegara-negara berkembang lainnya, hal utama yang dihadapi Indonesia adalah masalah keterbelakangan. Kondisi ini membawa Indonesia harus menetapkan model pembangunannya ke arah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai langkah paling menarik dalam mengejar ketertinggalan dari negara maju.

Kedua, jatuhnya pilihan model pembangunan pada pertumbuhan ekonomi menjadikan Indonesia harus memilih faktor-faktor sumber daya alamnya sebagai penopang utama. Hal inilah yang kemudian menjadikan Indonesia tidak maksimal dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Karena salah satu nilai yang terkandung dalam konsep pembangunan

ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan tidak menginginkan pertumbuhan ekonomi dikejar secara 'gila-gilaan' dengan menjadikan lingkungan sebagai korbannya. Faktanya, hingga saat ini Indonesia masih mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menjatuhkan pilihannya pada sumber daya lingkungan. Tidak heran jika pada akhirnya terjadi krisis lingkungan hidup di Indonesia, sedangkan disisi lain juga pertumbuhan ekonomi masih belum membawa dampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, Negara berkembang seperti Indonesia masih menganggap teknologi yang digunakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi selama ini tidak bisa serta-merta segera diganti dengan teknologi yang ramah lingkungan. Kendala utamanya adalah soal mahalanya teknologi yang ramah lingkungan tersebut. Sedangkan negara maju sendiri masih setengah hati dalam mengubah industrinya ke arah yang lebih ramah terhadap lingkungan.

B.2 Kebijakan-Kebijakan Non-Ekologis¹²

Kebijakan-kebijakan untuk melayani pasar agar bekerja sebebaskan-bebasnya terungkap dari berbagai Undang-Undang yang ada, seperti Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No 22 tahun 2001

¹² Data dalam sub-bab ini di olah dari Laporan Walhi dalam "Environmental Outlook 2008: Hak Atas Lingkungan Hidup Masih Di Langit" 23 Desember 2008.
(http://www.walhi.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=154&Ite

tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Semua Undang-Undang ini memiliki semangat yang sama, yaitu memberikan kemudahan akses perusahaan-perusahaan swasta untuk mengeruk sumber daya alam dengan jaminan hak milik yang lebih kuat.¹³

Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2008 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan juga sangat mengkhawatirkan. Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu No 1 tahun 2004) yang memberikan izin bagi usaha pertambangan di hutan lindung. Perpu yang kemudian diperkuat dengan Kepres No 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan di Kawasan Hutan, bersama DPR, kemudian ditetapkan menjadi UU No 19 tahun 2004. Keluarnya PP ini menunjukkan tidak konsistennya pemerintah Indonesia dalam agenda penurunan emisi global dengan melakukan penyelamatan kawasan hutan, sebagaimana komitmen yang disampaikan dalam pertemuan para pihak (COP 13) UNFCCC di Bali bulan Desember 2007.

¹³ Anto Sangaji. Neo-Liberalisme dan Pengalaman Indonesia

berdasarkan kebijakan ini bisa saja ditambang setelah mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berkompeten.

Disektor kelautan, paska dikeluarkannya Undang-Undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP-PPK), dimana salah satu isu penting yang terus mengemuka dan jadi perdebatan adalah terkait dilegalkannya Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Mekanisme HP-3 secara jelas membuka peluang liberalisasi yang luas kepada kaum pemodal besar untuk mengusahakan perairan pesisir. Undang-Undang No 27 tahun 2007 dalam prakteknya akan mendorong adanya privatisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; mendorong kaum pemodal mengambil alih wilayah kelola dan sumber-sumber penghidupan nelayan dan masyarakat pesisir, dan meniadakan akses dan kontrol rakyat atas wilayah pesisir dan laut. Dengan Undang-Undang ini pemerintah secara jelas menyerahkan urusan pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir kepada kaum pemodal, dengan melepaskan tanggung jawabnya sebagai pengurus negara yang melindungi hak seluruh rakyatnya.¹⁴

Pada tahun 2006, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional RI (BPN-RI) merencanakan untuk menjalankan Reforma Agraria dengan prinsip “tanah untuk keadilan dan kemakmuran”. Kemudian agenda pemerintah ini dikenal dengan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Program ini

terdiri dari 8,15 juta ha berasal dari hutan konversi dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN.

Selain itu, keinginan pemerintah untuk melakukan pengembangan Biofuel sedikitnya akan berdampak kepada meningkatnya angka deforestasi Indonesia akibat praktek konversi lahan, kolonialisme lahan, naiknya harga pangan, hilangnya lahan-lahan produktif rakyat yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, dan berkurangnya atau tercemarnya sumber daya alam seperti air dan kesuburan tanah, serta semakin termajinalisasinya masyarakat sekitar hutan.

Berdasarkan data dari Business Watch Indonesia, biofuel yang akan dikembangkan adalah sekitar 3 juta hektar untuk sawit, 1,5 juta hektar untuk jarak, 1,5 juta hektar untuk singkong dan 0,5 juta hektar untuk tebu, yang akan dikendalikan oleh tujuh perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan, diantaranya Raja Garuda Mas, Wilmar Group, Salim Group, Guthrie Bhd, Sinar Mas, Astra Agro Lestari, dan PBB oil Palm. Sehingga jelas pengembangan biofuel adalah bukan untuk menjawab kebutuhan energi melainkan ekspansi perusahaan-perusahaan yang selama ini telah cukup banyak melakukan kerusakan lingkungan hidup.

Pada Januari 2009, Menteri Kehutanan mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan industri pulp dan kertas menggunakan bahan baku kayu dari hutan alam. Pemerintah melalui Departemen Kehutanan akan memprivatisasi

(...)

Tengger-Semeru kepada perusahaan Sumitomo-Jepang, Taman Nasional Gunung Halimun-Salak kepada Bakrieland seluas 1.000 hektare, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan kepada PT Adi Niaga Kreanusa.¹⁵

Kondisi ekologi dan dampaknya pada perekonomian serta kesejahteraan sosial akan makin memburuk pada tahun-tahun ke depan, khususnya di wilayah pertambangan, sebab jumlah izin dan kontrak karya pertambangan hingga akhir tahun 2006 saja sudah berjumlah 2.599 untuk tambang mineral dan batu bara, tidak termasuk izin yang dikeluarkan kepala daerah paska otonomi daerah dan izin tambang galian lain yang meliputi pasir, batu dan kerikil (sirtukil). Rata-rata wilayah konsesi tambang menyumbang angka kemiskinan, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta ancaman kerusakan lingkungan hidup.

C. Faktor Eksternal

Secara teoretis, pembangunan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh peningkatan pendapatan per kapita seperti tercermin pada GNP. Namun, pertumbuhan mensyaratkan adanya akumulasi kapital, yang hanya bisa dicapai melalui investasi. Salah satu strategi untuk memacu akumulasi kapital dan mendorong investasi adalah industrialisasi. Pemikir-pemikir pembangunan mempunyai pemahaman yang serupa, bahwa "*capital*

¹⁵ Tranparancy International: Angka Merah Departemen Kehutanan (<http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2009/bulan/07/tanggal/06/id/4381/>)

accumulation, investment, and well-designed industrialization are the very crucial components to accelerate development". Ketiga hal tersebut merupakan kekuatan pendorong utama, yang dapat menggerakkan proses transformasi menuju masyarakat yang maju (modern) dan sejahtera.¹⁶

C.1 Importasi Ideologi¹⁷

Melihat latar belakang lahirnya teori modernisasi pada tahun 1950-an, saat ini dapat dengan jelas disimpulkan bahwa upaya Amerika Serikat dalam menyebarkan hegemoni pemikirannya kepada negara-negara Dunia Ketiga dapat dikatakan sangat berhasil. Hal itu terlihat dari mendominasinya pemikiran Rostow yang tertuang dalam teori pertumbuhan ekonomi dimana investasi asing, industrialisasi, serta pasar menjadi instrumen yang sampai sekarang masih diletakkan di posisi teratas oleh para pengambil kebijakan pembangunan di negara Dunia Ketiga, khususnya Indonesia.

Pada pertengahan 70-an, meskipun gagasan modernisasi mendapat kritik yang keras ditanah kelahirannya sendiri di Amerika Serikat, bahkan dianggap sebagai teori yang gagal, gagasan modernisasi justru mendapat tempat yang istimewa pada masyarakat Dunia Ketiga, khususnya kalangan birokrat atau

¹⁶ Evolusi Pemikiran (<http://one.indoskripsi.com/artikel-skripsi-tentang/evolusi-pemikiran-pembangunan>)

¹⁷ Istilah ini di gunakan untuk menyebutkan bagaimana Amerika berupaya menyebarkan ideologinya kepada negara berkembang, dalam buku Muhadi Sugiono "Kritik Antonio Gramsci

aparatus pembangunan dan akademisi.¹⁸ Di Indonesia, kalangan birokrat atau aparat pembangunan yang kebijakannya di pengaruhi oleh pemikiran Rostow sering disebut sebagai “Mafia Berkeley”.

Istilah Mafia Berkeley digunakan untuk menyebut para ekonom Indonesia yang ‘dibina’ oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai negara yang paling berkepentingan dengan upayanya menyebarkan ideologi modernis. Mereka adalah lulusan Universitas California di Berkeley, Amerika, yang diberi beasiswa oleh pemerintah Amerika untuk belajar dan kemudian pulang ke Indonesia menerapkan apa yang telah dipelajari dengan satu tujuan yaitu membelokkan arah pembangunan di Indonesia menuju ekonomi pasar.¹⁹

Pada masanya yaitu 1966, mereka berhasil menekan inflasi dari sekitar 600 persen pada tahun itu menjadi di bawah 10 persen pada tahun 1969. Mereka juga berhasil membekukan pembayaran utang luar negeri selama beberapa tahun, menggalang pembuatan utang luar negeri baru, dan menggenjot masuknya investasi asing secara besar-besaran. Hasilnya, terhitung sejak 1969, perekonomian Indonesia tumbuh dengan sangat pesat, rata-rata di atas enam persen per tahun.²⁰

Namun prestasi tersebut tidak mengherankan apabila dikaitkan dengan pemerintah tangan besi saat itu yang akan memberangus segala tindakan yang

¹⁸ Mansour Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press kerjasama dengan Pustaka Pelajar. Cet. IV 2006. Hal. 138.

dianggap menghambat kebijakan pemerintah. Selain itu, dukungan besar-besaran Amerika dengan ideologi pasarnya menjadikan Mafia Berkeley sebenarnya hanya menahkodai sebuah kapal yang penumpangnya tidak gaduh dan dengan keadaan laut yang tenang, maka tidak mengherankan jika kemudian saat itu menjadi masa keemasan para Mafia Berkeley.

Saat ini, mereka yang disebut sebagai Mafia Berkeley masih berada di posisi-posisi penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Serta masih tetap dengan ideologi yang telah dipelajarinya dulu, yang mereka yakini sebagai jalan terbaik untuk membawa Indonesia menjadi bangsa modern. Terbukti hingga kini, kebijakan pembangunan di Indonesia masih menjadikan investasi asing dan industrialisasi serta pasar sebagai menu utamanya.²¹

C.2 Kendali Pembangunan Oleh Pasar

Dalam teori ekonomi Smith (yang merupakan salah satu landasan bagi teori modernisasi), pasar bebas adalah syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. Memang bukan satu-satunya syarat, tapi merupakan syarat paling baik bagi pertumbuhan ekonomi.²²

Berangkat dari asumsi tersebut, pasar ternyata mempunyai dampak yang mengkhawatirkan terhadap sumber daya lingkungan. Selama ini pasar internasional tidak memperhitungkan biaya lingkungan yang ditimbulkan

²¹ *Ibid*,

²² Sonny Keraf. *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah; Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1996.

karena peningkatan produksi dan pengiriman barang-barang akibat peningkatan volume perdagangan. Dalam jargon ekonomi, biaya seperti ini dibebankan pada *external cost*. Artinya, kalangan pebisnis membebankan dampak yang ditimbulkan oleh produk yang dibuatnya kepada masyarakat sekitar.²³ Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu sebab terjadinya krisis lingkungan yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial, mengingat peningkatan volume perdagangan yang sangat pesat.

Tentang kehebatan pasar dalam mengontrol pembangunan, Giovanni Arrighi menulis bahwa sekelompok kecil kapitalis, para bankir dan pemilik modal yang tinggal di New York dan London, serta para pemimpin lembaga ekonomi internasional di Washington bisa punya kekuatan untuk memberlakukan, seolah dengan menggunakan *remote control*, berbagai peraturan pada setengah penduduk dunia yang berdiam di tempat yang jauh. Immanuel Wallerstein mendukungnya dengan menulis bahwa kapital tidak pernah mengizinkan tujuannya ditentukan oleh batas-batas nasional.²⁴

Di Indonesia, pengaruh pasar dalam mengendalikan pembangunan dapat di lacak setidaknya dari beberapa kelompok dan lembaga yang sangat berkepentingan dengan sistem pasar, yaitu kaum pemilik modal yang dapat dilihat dari aktivitasnya lewat investasi dan industrialisasi, serta lembaga Bretton Woods (WTO, IMF, Bank Dunia) yang dibelakangnya berdiri tegak

²³ Fachruddin M. Mangunjaya, *Op.Cit*, hal. 123

²⁴ Immanuel Wallerstein, *World-System and Capitalism*, I. S. II. Banting, Cit II, 2006, Hal. 41

negara-negara maju, khususnya Amerika yang sangat berkepentingan dengan gagasan modernisasinya.

C.2.1 Arus Investasi Asing

Investasi asing langsung (*Direct Investment*) merupakan investasi yang melibatkan pihak investor secara langsung dalam operasional usaha yang akan di laksanakan, sehingga dinamika usaha yang menyangkut kebijakan perusahaan yang di tetapkan, tujuan yang hendak di capai, tidak lepas dari pihak yang berkepentingan (investor asing). Artinya, Investasi Asing langsung adalah kontrol penuh pemilik modal terhadap manajemen dan kebijakan perusahaan dimana ia berinvestasi. Investasi asing tidak langsung (*portofolio*) merupakan investasi keuangan yang di lakukan di luar negeri. Bentuk investasi portofolio yang sering di temui adalah pembelian obligasi/perusahaan asing, tanpa kontrol manajemen di perusahaan investasi.²⁵

UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967), dan diperbaharui dengan Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, dikeluarkan untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar negeri.

Beberapa faktor yang menarik bagi masuknya investasi asing adalah: pasar domestik yang relatif luas; kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan produksi; serta melimpahnya sumber daya alam yang melimpah.²⁶ Indonesia, adalah salah satu negara yang memiliki hampir semua kriteria tersebut. Tidak heran jika investasi asing merupakan salah satu sumber bagi pembangunan di Indonesia.

Pasca reformasi, investasi asing langsung menjadi satu-satunya pilihan bagi modal pembangunan di Indonesia setelah IMF memperketat aturan berhutang karena melihat bagaimana hutang masa Orba justru dibagi-bagi saja oleh pemerintahan masa itu. Maka setiap kali pemerintahan baru terbentuk, indikasi untuk membuka kran secara lebar agar arus investasi asing dapat mengalir masuk ke dalam negeri terlihat hampir disetiap masa pemerintahan pasca reformasi ini.

Indonesia sempat dijauhi oleh para investor terkait kondisi politik dalam negeri, yaitu sekitar tahun 2002. Saat itu, aroma terorisme sangat menyengat di Indonesia, menjadikan Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak aman untuk berinvestasi. Akibatnya, pada tahun 2003, *United Nations Conference of Trade and Development* (UNCTAD) sebuah lembaga yang bernaung

²⁶ ... 1998 ... 11 ... Indonesia di antara 128 dari 140 negara yang

disurvei dalam hal prospek berinvestasi, di bawah Indonesia bertengger Suriname dan Gabon dengan urutan 139 dan 140.²⁷

Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Serangkaian kebijakan langsung dilakukan pemerintah masa itu, diantaranya adalah kunjungan sebuah tim yang dibentuk Menteri Perindustrian saat itu untuk melakukan kunjungan langsung ke berbagai negara yang memiliki banyak investor, memberikan masa pembebasan pajak (*tax holiday*), pengurangan tariff pajak (*tax rate reduction*) atau bahkan pengampunan pajak (*tax amnesty*) oleh BKPM, mempercepat waktu perizinan investasi dari 130 hari menjadi hanya 30 hari saja, serta kebijakan melakukan privatisasi terhadap BUMN.²⁸

Perlakuan istimewa terhadap investor tidak berhenti sampai disitu saja. Pemerintah Indonesia lewat BPKM telah memberikan insentif fiskal baik berupa pengecualian maupun pengurangan pajak pendapatan untuk sektor-sektor tertentu serta kebijakan satu pintu (*one stop shop policy*) bagi lancarnya investasi asing di Indonesia. Selain itu, para investor juga diberikan hak pengolahan tanah selama 95 tahun, hak pembangunan 80 tahun dan hak guna tanah 70 tahun.²⁹

Perbandingan antara investasi dalam negeri dengan investasi asing sangat jauh sekali. Investasi asing memang sempat turun pada periode 2001-2004.

²⁷ Revisond Baswir. *Op. Cit.* Hal. 119.

²⁸ Komitmen Investasi Asing di Indonesia Capai US\$31,33 M, 09 Nov 2007

Namun apa yang diusahakan pemerintah untuk menarik investasi asing dengan berbagai kemudahan akses, serta berbagai kebijakan yang memihak pada investor asing terlihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1
Perkembangan Realisasi Investasi 1990-2008³⁰

Tahun	Modal Domestik		Modal asing	
	Proyek	Nilai (Rp. Miliar)	Proyek	Nilai (US\$. Juta)
1990	253	2.398,6	100	706,0
1991	265	3.666,1	149	1.059,7
1992	225	5.067,4	155	1.940,9
1993	304	8.286,0	183	5.653,1
1994	582	12.786,9	392	3.771,2
1995	375	11.312,5	287	6.698,4
1996	450	18.609,7	357	4.628,2
1997	345	18.628,8	331	3.473,4
1998	296	16.512,5	412	4.865,7
1999	248	16.286,7	504	8.229,9
2000	300	22.038,0	638	9.877,4
2001	160	9.890,8	454	3.509,4
2002	108	12.500,0	442	3.082,6
2003	120	12.247,0	569	5.445,3
2004	130	15.409,4	548	4.572,7
2005	215	30.724,2	907	8.911,0
2006	162	20.649,0	869	5.991,7
2007	159	34.878,7	982	10.341,4
2008	239	20.363,4	1.138	14.871,4

CATATAN:

1. Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sector, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga.
2. Proyek : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan.

Melihat begitu besarnya peranan investasi asing dalam pembangunan di Indonesia, menjadikan para kaum bermodal menjadi seperti berada diatas pemerintah. Maka tidak heran jika arah pembangunan Indonesia, dari tahun ke tahun masih tidak bisa keluar dari kendali para investor. Kemudian yang terjadi adalah semakin jauhnya arah pembangunan kita dari model berkelanjutan, karena kaum investor tentu tak ingin dibatasi dalam melakukan ekspansi.

Kaitan antara investasi asing langsung dengan kerusakan lingkungan di Indonesia memang tidak tampak langsung. Namun akan menjadi jelas ketika investasi asing tersebut telah berwujud dalam bentuk industrialisasi. Namun investasi asing langsung dapat dikatakan sebagai langkah awal dari kendali pasar dalam pembangunan di Indonesia. Data berikut menunjukkan, bagaimana investasi asing langsung sebagian besarnya mengarah pada sektor industrialisasi, baik di bidang kehutanan, pertambangan, maupun industri olahan:

Tabel 4.2
Aliran Investasi Asing Langsung di Indonesia
Menurut Sektor Ekonomi (juta USD)³¹

Sektor/Tahun	2004	2005	2006	2007
Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	141	2	225	285
Perikanan	-	9	4	19
Pertambangan dan Penggalan	99	1226	322	1905
Industri pengolahan	834	5265	1691	2412
Konstruksi	-	130	85	196
Transportasi, Pegudangan dan Komunikasi	228	384	592	598
Lembaga Perantara Keuangan	233	780	1028	1338

C.2.2 Industrialisasi

Industrialisasi dianggap oleh gagasan modernisasi sebagai salah satu jalan yang paling penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Pemekaran industri yang berbasis pada kapitalisme internasional juga harus didukung oleh kekuatan penuh dari negara. Karena proses akselerasi—yang menjadi bagian terpenting untuk meningkatkan pertumbuhan—tidak boleh mendapat gangguan dan karenanya dibutuhkan kekuasaan yang mampu melayani dan menyediakan instrumen-instrumen penyubur industri.³²

Memang, pada beberapa negara, industrialisasi telah terbukti mampu menjawab persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi ternyata harus dibayar amat mahal karena memiliki dampak negatif terhadap kelestarian

³¹ BI: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_19.pdf)

³² Saiful Arif. Menolak Pembangunanisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. Hal. xx-xxi

lingkungan. Hasil sejumlah studi di negara-negara industri memperlihatkan bahwa bersamaan dengan pesatnya industrialisasi telah terjadi pula kerusakan lingkungan. Ironisnya, yang terjadi di Indonesia adalah kenyataan bahwa industrialisasi belum memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah kawasan industri untuk bebas dari belenggu kemiskinan, namun tetap memberi pengaruh terhadap kerusakan lingkungan.

Selama 20 tahun terakhir pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.³³ Sektor industri dan pendapatan nasional sangat ditentukan oleh sumber daya alam (SDA). Hampir 80% ekspor dan pendapatan nasional bertumpu pada SDA. Maka tidak berlebihan jika industrialisasi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, yang pada akhirnya menjadikan proses pembangunan berkelanjutan menjadi gagal.³⁴

Pada akhir 2009, Walhi Indonesia menunjukkan data terbaru tentang industri tambang di Indonesia. Sepanjang tahun 2008, produksi pertambangan Indonesia 188.663.068,44 ton (nilai ini tertinggi sejak tahun 2003). Sejumlah itu hasil produksi, yang menjadi konsumsi domestik hanya 49.026.072,21 ton, sedangkan sisanya 140.518.549,69 di ekspor ke luar Indonesia. Hal ini

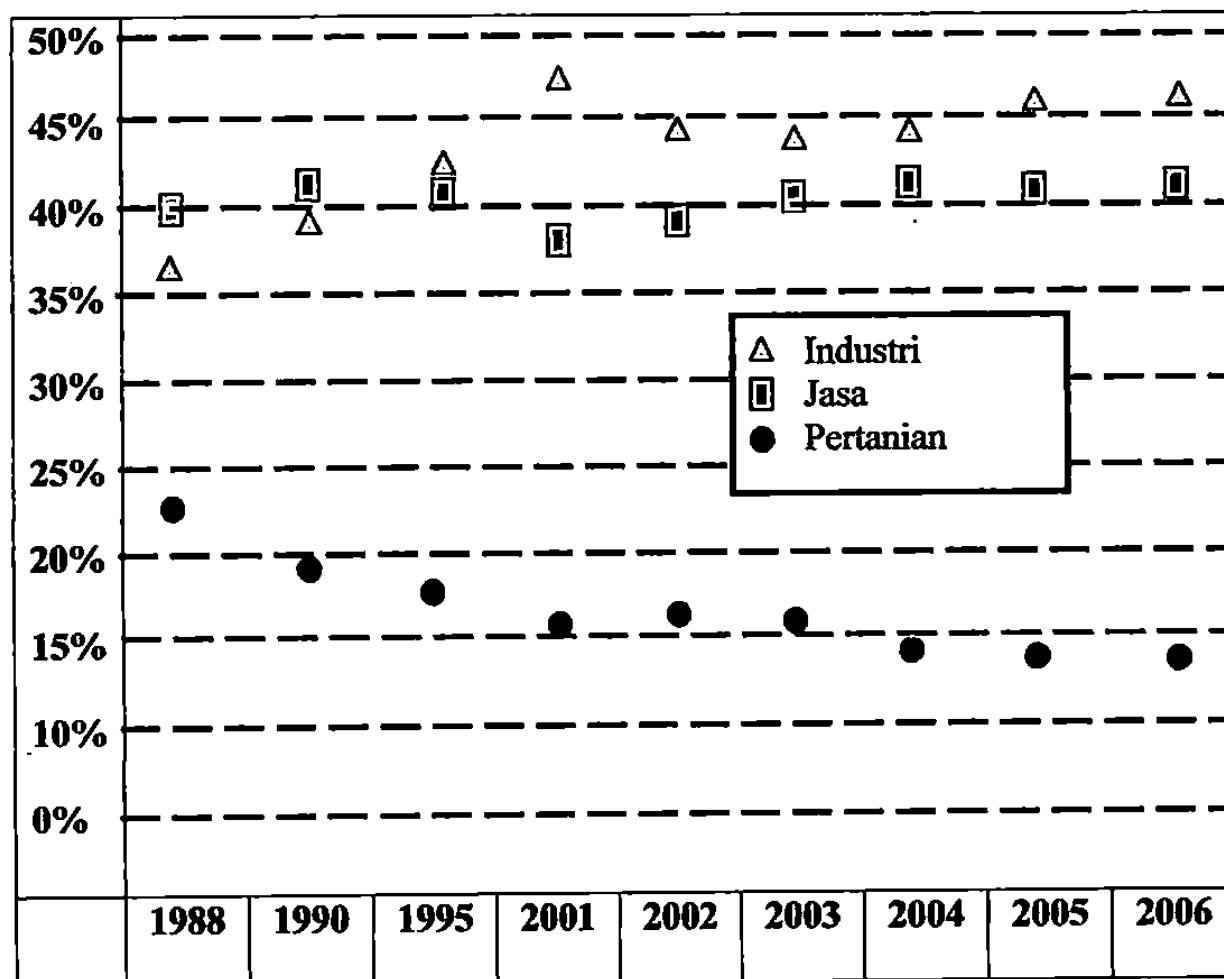
³³ Laporan Walhi dalam "Environmental Outlook 2008: Hak Atas Lingkungan Hidup Masih Di Langit" 23 Desember 2008. (http://www.walhi.or.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=154&Itemid=145&lang=in, diakses 17 Desember 2009)

³⁴ Fachrudin M. Mangunjaya. *Hidup Harmonis Dengan Alam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Hal. 113

menunjukkan bahwa industrialisasi yang selalu didengungkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, sejatinya hanya bualan belaka. Rakyat Indonesia lebih banyak menikmati 'getahnya' (mudharatnya) dibandingkan 'madunya' (manfaatnya).

Bukti, bahwa sektor industri menjadi pilihan utama untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tampak pada tabel berikut. Sektor industri, mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mengalahkan sektor yang lain.

Tabel 4.3
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia³⁵



Sumber: *database ADB*

Tabel diatas menjelaskan bagaimana industrialisasi menjadi sektor penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Pada tahun 1988, misalnya, pangsa sektor industri terhadap pembentukan PDB tercatat sekitar 37%, namun sejak 1997 telah melewati 40% dan bertahan terus hingga tahun 2006 berada di atas sektor jasa, serta jauh di atas sektor pertanian.

Keberadaan industrialisasi ini tidak dapat dilepaskan dari adanya arus investasi asing yang masuk ke Indonesia. Komposisi investasi asing langsung dan industrialisasi dalam mengendalikan pembangunan di Indonesia ke arah pasar setidaknya didasarkan pada dua alasan, yaitu: **pertama**, pada umumnya mereka yang memiliki modal mempunyai jaringan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan global (IMF, WTO, serta Bank Dunia), sehingga tidak tergantung pada dana dari perbankan di Indonesia. **Kedua**, bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, biasanya mereka sudah memiliki jaringan pasar global yang kuat, sehingga tidak ada kesulitan dalam mendistribusikan produksinya.

C.2.3 Lembaga Bretton Woods

Kendali pasar terhadap pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tangan WTO, IMF, serta World Bank. Lembaga ini sudah sejak masa presiden Soekarno ingin mengendalikan pembangunan di Indonesia. Namun baru pada masa presiden Soeharto, lembaga-lembaga ini mendapatkan tempat.

Selanjutnya, pasca reformasi lembaga-lembaga ini juga masih menjadi pilihan utama bagi pemerintah Indonesia dalam menggantungkan pembangunannya.

C.2.3.1 IMF dan World Bank

IMF dan World Bank adalah dua lembaga yang lahir dari rahim Washington Consensus. Keduanya sama-sama menjadi instrumen penyebaran ideologi pasar. Secara sederhana keduanya memiliki fungsi sebagai berikut, World Bank memiliki fungsi untuk memberikan pinjaman jangka panjang ke negara-negara berkembang untuk mendanai berbagai proyek pembangunan. Sedangkan IMF berfungsi untuk menentukan dan memilih mana negara-negara yang perlu dibantu untuk mencapai stabilitas ekonomi dan finansialnya serta memberikan arahan-arahan apa yang harus dikerjakan oleh negara yang mendapat bantuan hutang. Satu hal yang dipegang keduanya adalah apa yang dinamakan SAP (*struktur adjustment programs*).³⁶

Skema SAP dari Bank Dunia dan IMF bertujuan: menurunkan inflasi; menurunkan defisit anggaran; memacu ekspor (inilah yang kemudian memacu kerusakan lingkungan di Indonesia, karena tumpuan ekspor Indonesia adalah produksi bahan mentah dari sumber daya alam); dan membuat jadwal pembayaran hutang luar negeri lancar. Untuk itu, pemerintah harus melakukan hal-hal sebagai berikut: pemotongan subsidi; privatisasi BUMN; liberalisasi sektor perdagangan; dan penurunan upah.

³⁶ Amien Rais, *Op. Cit.* Hal. 94-95

Implementasi SAP terlihat dari penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) oleh Indonesia dan IMF sebanyak delapan kali selama periode 1997-2002. Namun hasilnya, Indonesia masih saja terpuruk sebagai penghuni negara Dunia Ketiga. Masalah kesejahteraan sosial masih jauh dari harapan. Parahnya, krisis lingkungan telah menjadi 'bom waktu' yang setiap saat mengancam segala sendi kehidupan bangsa ini.

Tahun 2003, Indonesia 'putus' hubungan dengan IMF sesuai dengan rekomendasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sekilas, tahun 2003 akan menjadi moment bagi Indonesia untuk memulai pembangunannya tanpa kendali dari IMF. Benar saja, akhir tahun 2003 Indonesia resmi 'putus' dari IMF. Tetapi kemudian, seperti sudah dapat diduga, kendali IMF terhadap pembangunan di Indonesia tidak 100% hilang.³⁷

Salah satu syarat untuk 'putus' dari IMF adalah Indonesia harus segera membayar semua hutangnya kepada IMF pada akhir 2003. Pemerintah bisa saja memilih melunasi hutangnya dengan cadangan devisa. Tapi pada akhirnya pemerintah tidak memilih hal itu. Pemerintah lebih memilih opsi *Post Program Monitoring* (PPM) dalam mengakhiri kontrak kerjasamanya dengan IMF. Dengan memilih opsi ini, berarti pemerintah Indonesia tidak harus melunasi hutangnya kepada IMF, melainkan diangsur hingga akhir

³⁷ Revisond Baswir. *Op. Cit.* Hal. 62-66

2010. Secara otomatis pula, kendali IMF terhadap pembangunan di Indonesia masih terjadi.³⁸

Menurut Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (pustep) UGM, dengan memilih opsi ini maka secara otomatis Indonesia masih berada dibawah kendali IMF. Indonesia harus tetap melakukan agenda-agenda IMF yang terkandung dalam *LoI*. Maka akan muncul dua bahaya besar yaitu: pertama, keputusan memilih opsi PPM akan semakin menjadikan Indonesia tergantung dan tidak bisa memilih sendiri arah pembangunannya. Kedua, dengan tetap melakukan agenda-agenda dari IMF, ini akan mengancam kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara karena terus menerus berada dibawah kendali IMF dan Bank Dunia.

Keinginan IMF dalam mengendalikan pembangunan juga semakin terlihat jelas dari proses pengambilan keputusannya. Sesuai ketentuan, proses pengambilan keputusan di IMF berdasarkan jumlah pemilikan saham negara-negara anggota. Jika jumlah suara minimal 85% menyetujui terpenuhi maka keputusan dapat diberlakukan. Masalahnya negara-negara maju menguasai 45% suara, sedangkan AS saja memiliki 18% suara sehingga seluruh

negara maju lainnya. Akibatnya kepentingan-kepentingan negara-negara maju khususnya AS sangat mendominasi kebijakan-kebijakan IMF.³⁹

C.2.3.2 WTO

Kendali WTO terhadap pembangunan di Indonesia juga tidak kalah garang. Keikutsertaan Indonesia dalam badan perdagangan internasional (WTO) menjadikan negeri ini seperti tersandera. Badan perdagangan internasional ini dilengkapi pengadilan dan peraturan internasional yang dapat menjatuhkan sanksi perdagangan bagi pelanggar perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menjadikan Indonesia terus berusaha memenuhi semua prasyarat perdagangan dunia yang dikendalikan oleh WTO.⁴⁰ Akibatnya, bangsa ini menjadi tidak leluasa dalam menentukan arah pembangunannya.

Keberadaan WTO adalah bentuk metamorfosa dari sebuah lembaga perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan, yaitu GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang terbentuk pada tahun 1947. Putaran Uruguay merupakan putaran perundingan ke-8 yang dimulai sejak 1986 dan berakhir pada Maret 1994 di Marrakesh, Maroko, GATT berubah nama secara

³⁹ Hidayatullah Muttaqien. Jurnal ekonomi Ideologis, IMF dan Bahaya yang ditimbulkannya <http://jurnal-ekonomi.org/2006/09/09/imf-dan-bahaya-yang-ditimbulkannya/>, di akses 12 Januari 2010)

resmi menjadi WTO. Lembaga GATT yang berstruktur lepas berubah menjadi sebuah organisasi dunia yang berstruktur tetap.⁴¹

Organisasi ini dijuluki sebagai "*the rich man's club*" karena didominasi negara-negara maju, khususnya Barat. Memang jumlah keanggotaannya lebih banyak negara berkembang dari pada negara maju, namun dari sisi peran, negara maju lebih mendominasi dari pada negara berkembang. Itulah sebabnya, mengapa UNCTAD (*UN Conference on Trade and Development*) yang berada dibawah PBB sampai menilai bahwa peraturan perdagangan global sangat tidak seimbang dan bias sehingga menyebabkan negara berkembang malah semakin terjermus dalam jurang kemiskinan dan keterbelakangan.⁴²

Penelitian UNDP mengungkapkan bahwa perekonomian di negara berkembang (seperti Indonesia) sangat tidak berkorelasi dengan kebijakan liberalisasi.⁴³ Justru, kebijakan itulah yang menyebabkan negara berkembang kehilangan kemampuannya dalam membawa arah pembangunannya karena tidak dapat lepas dari kontrol dan kendali peraturan-peraturan yang ada, yang pembuatannya sangat didominasi kepentingan negara-negara maju.

Prof. DR. Amien Rais⁴⁴ memberikan data-data yang sangat mengejutkan bahwa Indonesia seperti tidak lagi memiliki kemandirian untuk menentukan

arah pembangunannya. Pihak asing bisa memiliki hingga 99% saham bank di Indonesia. Ini jauh lebih tinggi dari komitmen Indonesia di WTO yang pada awalnya adalah 49%, lalu dinaikkan menjadi 51%. Indonesia bahkan lebih liberal dari negara-negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, Singapura dan sebagainya yang menerapkan pembatasan kepemilikan asing dalam sektor perbankan.

Batas Kepemilikan Modal Asing di sektor Energi dan Sumber daya Mineral, pihak asing diperbolehkan memiliki 95% dalam bidang usaha Pembangkit Tenaga Listrik; 95% Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Lepas Pantai Indonesia Bagian Timur; 95% Tranmisi tenaga Listrik; 95% Distribusi Tenaga Listrik; 95% Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; 95% Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di darat; 95% Pengembangan Tenaga Peralatan Penyediaan Listrik; dan lain sebagainya.

Di sektor Pekerjaan Umum, kepemilikan asing boleh sampai 95% untuk Pengusahaan Jalan Tol dan 95% Pengusahaan Air Minum. Di sektor Pertanian, asalkan luas lahan melebihi 25Ha, kepemilikan asing boleh sampai 95% untuk bidang usaha Budi daya Padi, 95% Budi Daya Jagung, 95% Budi daya Ubi Kayu; Budi Daya tanaman pangan lainnya selain ubi kayu dan jagung; 95% Pembenuhan/pembibitan palawija; 95% usaha industri perbenihan; 95% usaha perkebunan dan/atau industri pengolahan hasil kelapa sawit; dan lain sebagainya. Bagaimana kita dapat membela petani kita, kalau

Dalam hal akses pasar, negara maju masih bersikukuh membatasi melalui penerapan kuota impor. AS masih mempertahankan 54 produk, Jepang 20 produk, Korea 67 produk, Uni Eropa 85 produk, Thailand 23 produk, Malaysia 19 produk, Norwegia 232 produk, Swiss 28 produk dan Polandia 109 produk, sedangkan Indonesia hanya 2 produk. Selain itu, AS dan UE juga tetap berniat meneruskan subsidi 300 milyar dollar setahun. Mereka menganggap bahwa subsidi ini sangat penting bagi produk-produknya agar memiliki daya saing di pasar global. Dengan keadaan seperti ini, sulit bagi Indonesia untuk menentukan sendiri arah pembangunannya.

Indikasi liberalisasi juga dapat dilihat dari tingkat penerapan tarif. Tabel berikut menjelaskan bagaimana Indonesia sangat membuka diri terhadap produk-produk dari luar.

Tabel 4.4
Persentase Jumlah Penerapan Tarif menurut Kelompok Tarif
1998 dan 2003⁴⁵

Kelompok Tarif	1998	2003
0-10%	72%	83%
15-20%	25%	15%
25-30%	2%	0,5%
>30%	1%	1%

Terlihat dari data di atas, bahwa Indonesia menjadi semakin liberal karena pada tahun 1998, pos tarif yang berada dibawah 10% sebesar 72% produk. Namun justru menjadi semakin liberal saat pos tarif yang berada di bawah

⁴⁵ M. Husein Sawit. *Op. Cit*, Hal. 33.

10% meningkat menjadi 83% produk. Sedangkan produk yang dikenai tarif tinggi di atas 30% hanya berjumlah 1% dari jumlah produk yang ada.